

Citizenship education: Modal di era disrupsi

Dina Indriyani^{a,1}

^a Universitas Suryakencana, Cianjur

¹ dinaindriyani08@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia tidak bisa dan tidak mungkin dapat melepaskan diri dari cengkraman era disrupsi. Era dimana hampir seluruh lini kehidupan manusia disusupi bahkan dikuasai oleh teknologi. Perkembangan teknologi di era disrupsi sangat masif membawa sejumlah perubahan paradigma dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan paradigma kehidupan masyarakat di era disrupsi yang masif menyebabkan munculnya *culture shock* di masyarakat. *Culture shock* adalah suatu kondisi dimana masyarakat tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan yang begitu masif dan cepat sehingga masyarakat seolah-olah mengalami kegoyahan nilai sosial dalam masyarakat. Fenomena *culture shock* ini tidak lantas dibiarkan begitu saja melainkan harus di tangani dengan masif pula karena jika tidak segera diatasi dikhawatirkan akan memunculkan masyarakat disruptif. Untuk mengatasi *culture shock* pada masyarakat di era disrupsi saat ini diperlukan penguatan *citizenship education* yang diberikan kepada seluruh masyarakat. Penguatan *citizenship education* tidak hanya mencakup sebagai bentuk formal pendidikan kewarganegaraan saja tetapi bentuk-bentuk informal serta non formal pendidikan kewarganegaraan. Bentuk-bentuk informal atau non formal ini dapat berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi proses pendewasaan ataupun pematangan sebagai warga negara yang baik dan juga cerdas. Dengan memberikan *citizenship education* yang mapan bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi modal bagi masyarakat dalam memasuki era disrupsi dan menjawab tantangan yang ada di era disrupsi.

Kata kunci: *citizenship education, era disrupsi, culture shock.*

Copyright ©2020 Universitas Ahmad Dahlan, All Right Reserved

PENDAHULUAN

Era Disrupsi adalah fenomena baru yang muncul di tengah peradaban manusia di dunia saat ini. Era disrupsi adalah sebuah era yang ditandai dengan pesatnya laju perkembangan teknologi yang memasuki semua unsur kehidupan manusia. Segala unsur kehidupan manusia di era disrupsi ini tidak dapat dilepaskan dari pesatnya laju teknologi. Fenomena disrupsi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat. Fenomena disrupsi ini mengacak-acak pola tatanan kehidupan lama untuk menciptakan pola tatanan kehidupan baru yang lebih dikuasai oleh teknologi. Arus percepatan perkembangan teknologi di era disrupsi sangat tak terbendung. Arus informasi dengan ditopang oleh pesatnya laju teknologi semakin mudah diperoleh oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Tak hanya itu teknologi yang pesat juga telah membawa arus budaya luar memasuki budaya lokal. Era disrupsi ini akan menuntut kita untuk berubah atau punah. Menurut Kasali (2017), disrupsi tidak hanya bermakna fenomena perubahan hari ini (*today change*) tetapi juga mencerminkan makna fenomena perubahan hari esok (*the future change*). Oleh karena itu, era disrupsi menuntut kita untuk

mampu mengimbangi perubahan yang ada hari ini dan juga perubahan yang akan datang.

Kemunculan era disrupsi ini tidak hanya membawa angin segar bagi kehidupan masyarakat tetapi juga memimbulkan sejumlah ancaman bagi kehidupan masyarakat. Arus budaya asing yang masuk dengan cepat seiring perkembangan teknologi telah mampu menimbulkan kepanikan budaya (*Culture Shock*) di masyarakat Indonesia. *Culture Shock* ini adalah sebagai reaksi kekagetan masyarakat Indonesia akan datangnya arus budaya asing yang masuk ke Indonesia seiring perkembangan teknologi di Era Disrupsi ini. Fenomena *culture shock* ini menggambarkan dari semakin goyahnya tatanan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat identik dengan adat atau nilai ketimuran yang sangat memegang nilai moral di masyarakat. Saat ini, di era disrupsi dengan munculnya *culture shock* di masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia yang sangat memegang nilai moral dalam setiap tingkah lakunya seakan kehilangan acuan dalam berperilaku. Perilaku masyarakat menjadi tidak lagi mencerminkan nilai moral yang berlaku di Indonesia. Perilaku masyarakat saat ini lebih condong kebarat-baratan yang tidak lagi mengindahkan nilai moral adat Indonesia yang ketimuran. Fenomena ini semua adalah dampak

belum siapnya mentalitas masyarakat Indonesia terhadap perubahan tatanan kehidupan yang terlalu cepat akibat pesatnya arus teknologi di era disrupsi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature. Peneliti mengumpulkan beberapa literature yang sesuai dengan pembatasan masalah yang ada untuk kemudian ditelaah dan dianalisis secara mendalam dan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi yang ditandai oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat pesat, terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah mengubah dunia seakan-akan menjadi kampung dunia (*global village*). Hantaman globalisasi mengakibatkan dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara. Kondisi yang demikian itu berdampak pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di samping itu, dapat pula mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia. Fenomena globalisasi telah menantang kekuatan penerapan unsur-unsur karakter bangsa. Kenichi Ohmae dalam bukunya yang berjudul *Borderless World: Power and Strategy in the Interlinked Economy* (1999) *The End of Nation State: The Rise of Regional Economies* (1996) mengatakan bahwa dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografis dan politik relatif masih tetap. Namun kehidupan dalam suatu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, inovasi, dan industri yang membentuk peradaban modern. Fenomena globalisasi dunia inilah yang menginisiasi munculnya era kehidupan baru masyarakat yang bernama era disrupsi.

Di era disrupsi ini seiring dengan hantaman arus globalisasi yang terus menggempur Indonesia telah memberikan berbagai dampak terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam kurun waktu belakangan ini, tidak bisa dipungkiri di Indonesia telah sering terjadi tindak kriminalitas, kekerasan, dan maraknya video porno yang beredar, dan parahnya lagi video tersebut sangat mudah untuk diakses melalui internet. Hal itu menjadi salah satu indikator bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah yang sangat besar yaitu, krisis moral dan karakter anak bangsa. Pada dasarnya masalah itu bersumber dari suatu kondisi tidak siapnya masyarakat Indonesia untuk

menerima hal-hal perubahan yang sangat masif yang masuk seiring arus globalisasi di era disrupsi ini sehingga masyarakat mengalami kepanikan budaya (*culture shock*). *Culture shock* ini mengakibatkan memudarnya jati diri masyarakat dan kegagalan dalam pengembangan serta penerapan pendidikan karakter bangsa. Budaya adiluhung (*highcultural*) dan karakter bangsa semakin terdistorsi oleh merebaknya pengaruh budaya global yang setiap hari dilihat dan didengar melalui berbagai saluran informasi. Etika berperilaku, sopan santun, keramah-tamahan, tolong menolong dan semangat kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tergusur oleh semangat demokratisasi yang seringkali diartikan sebagai kebebasan yang seluas-luasnya. Gaya hidup individualis, materialistis dan liberalis berkembang pesat seiring dengan merebaknya pengaruh globalisasi yang bersumber dari masyarakat barat. Kemajuan teknologi telah mendegradasi nilai moral yang berlaku di masyarakat.

Culture shock atau guncangan budaya merupakan ketidaksesuaian unsur-unsur yang saling berbeda sehingga menghasilkan suatu pola yang tidak berfungsi secara serasi bagi masyarakat. Masyarakat yang belum siap menerima perubahan-perubahan yang terjadi maka, masyarakat tersebut mengalami *culture shock*. *Culture shock* ini dapat mengakibatkan masyarakat akan tertinggal dan frustrasi apabila masyarakat tidak dapat segera menyesuaikan perubahan yang terjadi. Ada empat tanda *culture shock*, yaitu: 1) Terus-menerus memiliki pikiran negative dan membanding-membandingkan; 2) Mulai frustrasi, gampang marah dengan pola pergaulan; 3) Merasa terasingkan dengan keadaan sekitar; dan 4) Mulai kehilangan identitas diri dan ciri pribadi. Contoh dari *culture shock* adalah pola pergaulan yang konsumtif atau hedonism (memuja kemewahan) budaya asing sudah menjadi pola pergaulan remaja saat ini. Apabila remaja tidak siap dan tidak dapat menyesuaikan maka akan menimbulkan perilaku tertutup atau perilaku menyimpang. Istilah *culture shock* pertama kali dikemukakan oleh Kalervo Oberg (1960) untuk menyatakan apa yang disebutnya sebagai suatu penyakit jabatan dari orang-orang yang tiba-tiba dipindahkan ke dalam suatu kebudayaan yang berbeda dari kebudayaannya sendiri, semacam penyakit mental yang tak disadari oleh korbannya. Hal ini akibat kecemasan karena orang itu kehilangan atau tak melihat lagi semua tanda dan lambang pergaulan sosial yang sudah dikenalnya dengan baik. Kondisi *culture shock* di era disrupsi ini harus mendapat penanganan serius sehingga tidak terjadi berkepanjangan dan memicu munculnya fenomena *Society Less Value*, yaitu

suatu kondisi masyarakat yang tidak mengenal nilai sehingga kehidupan masyarakat tidak didasari atas nilai moral yang berlaku di masyarakat. Untuk menangani fenomena *culture shock* di era disrupsi ini adalah dengan mengoptimalkan *citizenship education*.

Cogan membedakan istilah pendidikan kewarganegaraan (Bahasa Indonesia) dalam dua pengertian, yakni *civic education* dan *citizenship education* atau *education for citizenship* (Cogan & Derricot, 1998). *Civic education* adalah pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sempit yakni sebagai bentuk pendidikan formal, seperti mata pelajaran, mata kuliah atau kursus di lembaga sekolah, universitas atau lembaga formal lain. Sedangkan *citizenship education* mencakup tidak hanya sebagai bentuk formal pendidikan kewarganegaraan tetapi bentuk-bentuk informal dan non formal pendidikan kewarganegaraan (Wahab & Sapriya, 2011). Jadi, *citizenship education* adalah pendidikan kewarganegaraan dalam arti umum dan luas. Bentuk-bentuk informal atau non formal dapat berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Dapat diartikan pula bahwa *civic education* merupakan bagian dari *citizenship education*. *Civic education* adalah *citizenship education* yang dilakukan melalui sekolah.

Pada tataran kurikuler *civic education* baik substansi, proses pembelajaran, maupun efek sosio-kulturalnya sengaja dirancang dan diprogramkan untuk mewujudkan program-program pendidikan demokrasi yang bermuara pada pembentukan karakter bangsa Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan karakter warga aktor baik karakter privat, seperti tanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu; maupun karakter aktor, misalnya kepedulian sebagai warga aktor, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi (Winataputra & Budimansyah, 2007, hal. 192).

Citizenship education melalui *civic education*nya merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang memiliki tugas profesional untuk membina siswa agar menjadi generasi penerus yang dalam konteks pembinaan generasi muda menjadi seorang warga negara dewasa. Anak adalah warga negara hipotetik, yakni warga negara yang “belum jadi” karena masih harus dididik menjadi warga negara dewasa yang sadar akan hak dan kewajibannya (Budimansyah, 2007, hal. 11). Oleh

karena itu, masyarakat sangat mendambakan generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negaranya serta memiliki karakter kebangsaan yang kuat yang mampu menghadapi segala tantangan di era disrupsi seperti saat ini atau tantangan kelak di masa yang akan datang. Sampai saat ini *citizenship education* sudah menjadi bagian inheren dari instrumentasi serta praksis pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”.

Konfigurasi atau kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut (Budimansyah, 2008, hal. 180). Pertama, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Ketiga, PKn secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content-embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk membangun dan menguatkan karakter bangsa sehingga mampu menghadapi derasnya arus perkembangan teknologi di era disrupsi, *Citizenship Education* harus memainkan peran sebagai program kurikuler pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal, sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan, dan sebagai pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, pimpinan dan anggota organisasi sosial dan organisasi politik.

KESIMPULAN

Memasuki Era perkembangan teknologi masif atau Era Disrupsi saat ini tatanan kehidupan masyarakat Indonesia mengalami suatu fenomena kegamangan kebudayaan yang disebut dengan *culture shock*. *Culture shock* adalah suatu kondisi

dimana masyarakat kehilangan pegangan akan Budaya Adiluhung (*highcultural*) dengan salah satu tandanya adalah karakter bangsa yang semakin terdistorsi oleh budaya asing yang dengan cepatnya masuk seiring dengan deranya laju pertumbuhan teknologi dunia. Untuk menangani fenomena *culture shock* di era disrupsi ini adalah dengan mengoptimalkan *citizenship education*. *Citizenship Education* harus memainkan peran sebagai program kurikuler pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Melalui *citizenship education* masyarakat dibekali oleh berbagai pengetahuan kewarganegaraan, kepercayaan kewarganegaraan dan kepekaan kewarganegaraan yang akan mampu menghalau gempuran arus teknologi dan informasi yang condong menyesatkan arah kehidupan masyarakat. Modal yang diberikan melalui *citizenship education* ini diharapkan akan mampu menahan gempuran era disrupsi yang mampu mendistorsi nilai moral di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih digunakan untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang berperan dalam penelitian/artikel, baik dalam bentuk support dana, perizinan, konsultan maupun tim yang berperan dalam membantu pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Budimansyah, D. (2007). Pendidikan Demokrasi sebagai Konteks Civic Education di Negara-negara Berkembang. *Jurnal Acta Civicus*, 1(1), 11–26.
- Budimansyah, D. (2008). Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui Praktik Belajar Kewarganegaraan (Project Citizen). *Jurnal Acta Civicus*, 1(2), 179–198.
- Cogan, J. J., & Derricot, R. Y. (1998). Citizenship Education for The 21st Century: Setting the Context. In J. J. Cogan & R. Derricott (Ed.), *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education* (hal. 1–20). Kogan Page.
- Kasali, R. (2017). *Disruption*. Gramedia Pustaka Utama.
- Oberg, K. (1960). Cultural Shock: Adjustment to New Cultural Environments. *Practical Anthropology*, 05-7(4), 177–182.
<https://doi.org/10.1177/009182966000700405>
- Ohmae, K. (1996). *The end of the nation state: The*

rise of regional economies.
HarperCollinsPublisher.

- Ohmae, K. (1999). *The borderless world: Power and strategy in the interlinked economy*. HarperCollins.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2007). *Civic education: Konteks, landasan, bahan ajar, dan kultur kelas*. Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.